

## PROYEKSI KARIER LULUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM: TANTANGAN DAN PELUANG DI SEKTOR ADMINISTRASI PUBLIK

<sup>1</sup>Almadani, <sup>2</sup>Rizki Amanda Harahap, <sup>3</sup>Nia Putri Ramadani Polem, <sup>4</sup>Salsabilla Azhara Ritonga, <sup>5</sup>M Faiz Muhtadi Siregar, <sup>6</sup>Alfi Rahmat, <sup>7</sup>Zulkarnain

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [Almadani0404221003@uinsu.ac.id](mailto:Almadani0404221003@uinsu.ac.id), [Rizki0404221004@uinsu.ac.id](mailto:Rizki0404221004@uinsu.ac.id),  
[Putriramadhani0404221009@uinsu.ac.id](mailto:Putriramadhani0404221009@uinsu.ac.id), [Salsabilla0404221010@uinsu.ac.id](mailto:Salsabilla0404221010@uinsu.ac.id),  
[Muhhammad0404221011@uinsu.ac.id](mailto:Muhhammad0404221011@uinsu.ac.id), [Alfi0404221005@uinsu.ac.id](mailto:Alfi0404221005@uinsu.ac.id),  
[zul.karnain@uinsu.ac.id](mailto:zul.karnain@uinsu.ac.id)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proyeksi karier lulusan Program Studi Pemikiran Politik Islam serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam sektor administrasi publik. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kebutuhan aparatur publik yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga landasan etika, integritas, dan pemahaman nilai-nilai keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, focus group discussion, dan analisis dokumen terhadap alumni Pemikiran Politik Islam yang bekerja di sektor administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lulusan Pemikiran Politik Islam memiliki kompetensi analitis, pemahaman politik normatif, serta kepekaan etis yang relevan dengan prinsip good governance. Namun demikian, mereka masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kompetensi praktis, keterbatasan akses rekrutmen aparatur negara, serta kompleksitas sistem birokrasi yang sedang mengalami reformasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan penguatan keterampilan aplikatif, literasi kebijakan publik, dan dukungan pengembangan kurikulum yang adaptif, lulusan Pemikiran Politik Islam memiliki peluang besar untuk berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan administrasi publik yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Pemikiran Politik Islam, Proyeksi Karier, Lulusan, Administrasi Publik, Good Governance*

### PENDAHULUAN

Program studi Pemikiran Politik Islam memiliki posisi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami dinamika politik dan kekuasaan, tetapi juga memiliki landasan etika, nilai keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem demokrasi dengan masyarakat multikultural, lulusan Pemikiran Politik Islam diharapkan mampu menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan praktik politik dan tata kelola pemerintahan modern (Pratiwi et al., 2025 : 207). Penelitian dalam jurnal nasional bidang politik Islam menunjukkan bahwa integrasi nilai etika Islam dalam kebijakan publik menjadi kebutuhan penting di tengah

krisis kepercayaan terhadap institusi negara (Kahar Gani, 2025 : 107). Lulusan Pemikiran Politik Islam pada dasarnya memiliki modal intelektual untuk berperan sebagai analis kebijakan, perencana program, maupun aktor birokrasi yang sensitif terhadap isu keadilan sosial dan kemaslahatan publik. Namun demikian, proyeksi karier lulusan masih kerap dipersepsikan terbatas pada ranah akademik dan keagamaan, sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk melihat peluang aktual mereka di sektor administrasi publik yang terus berkembang dan menuntut perspektif multidisipliner.

Sektor administrasi publik saat ini mengalami transformasi signifikan, terutama akibat reformasi birokrasi dan percepatan digitalisasi pelayanan publik. Kondisi ini menciptakan tantangan baru bagi lulusan Pemikiran Politik Islam, khususnya dalam hal penguasaan keterampilan teknis administratif, literasi digital, dan manajemen kebijakan publik. Aparatur publik masa kini tidak hanya dituntut memahami regulasi, tetapi juga mampu berpikir adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sinilah tantangan utama lulusan Pemikiran Politik Islam muncul, yakni bagaimana menerjemahkan pemikiran normatif dan filosofis ke dalam praktik kerja birokrasi yang bersifat teknokratis. Meskipun demikian, tantangan tersebut juga membuka ruang pengembangan diri melalui penguatan kompetensi praktis, pelatihan profesional, serta kolaborasi lintas disiplin. Dengan bekal analisis politik dan pemahaman struktur kekuasaan, lulusan Pemikiran Politik Islam berpotensi menjadi aktor strategis dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas (Yungkul, 2025 : 3104).

Di sisi lain, peluang karier lulusan Pemikiran Politik Islam di sektor administrasi publik semakin terbuka seiring meningkatnya kebutuhan akan aparatur yang memiliki integritas, kepekaan sosial, dan kemampuan analisis kebijakan berbasis nilai. Penelitian jurnal nasional empat tahun terakhir menunjukkan bahwa pendekatan etis dan partisipatif dalam administrasi publik menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Hal ini menempatkan lulusan Pemikiran Politik Islam pada posisi yang relevan, terutama dalam peran sebagai perancang kebijakan, staf perencanaan pembangunan, maupun fasilitator partisipasi publik (Rahmat Hidayat, Adi Setiabudi et al., 2025 : 122). Oleh karena itu, kajian mengenai proyeksi karier lulusan Pemikiran Politik Islam menjadi penting untuk memetakan tantangan sekaligus peluang yang tersedia secara realistis. Pendahuluan ini menjadi pijakan awal untuk memahami bahwa relevansi Pemikiran Politik Islam tidak berhenti pada tataran wacana akademik, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam penguatan sektor administrasi publik yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

## METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena proyeksi karier lulusan Pemikiran Politik Islam dalam sektor administrasi publik dari perspektif pengalaman dan narasi para alumninya. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang menekankan pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang subjek yang diteliti, serta kemampuan untuk menggali makna dan interpretasi di balik pengalaman nyata para lulusan yang bertransisi dari bangku akademik ke dunia kerja. Metode serupa telah digunakan dalam penelitian alumni yang menggambarkan persepsi dan realita status pekerjaan serta jalur karier mereka secara kualitatif, yang memungkinkan analisis yang kaya dan kontekstual terhadap dinamika karier alumni setelah lulus (Istaryatiningtias, 2025 : 666).

Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data melalui teknik seperti wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), dan analisis dokumen (misalnya laporan tracer study dan

portofolio karier alumni). Wawancara mendalam dirancang untuk menangkap narasi pribadi alumni tentang tantangan yang mereka hadapi saat memasuki sektor administrasi publik, keterampilan yang mereka nilai penting, serta peluang yang terbuka bagi mereka dalam karier profesional. *Fokus group discussion* akan melibatkan alumni dan pemangku kepentingan dari instansi publik untuk memperkaya pemahaman tentang persepsi terhadap kompetensi lulusan Pemikiran Politik Islam. Analisis dokumen melengkapi wawancara dan FGD untuk melihat hubungan antara pengalaman empiris alumni dengan kebijakan atau kebutuhan administrasi publik.

Dalam penelitian kualitatif ini, data dikumpulkan secara purposive untuk memastikan informan yang dipilih relevan dengan fokus kajian, yaitu alumni Pemikiran Politik Islam yang aktif bekerja atau pernah bekerja di sektor administrasi publik. Teknik wawancara semi-terstruktur menjadi alat utama untuk menggali pengalaman subjektif para alumni, termasuk tantangan adaptasi kompetensi akademik ke kebutuhan birokrasi serta peluang karier yang mereka rasakan. Kuesioner terbuka dapat juga digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan dari alumni yang tersebar secara geografis luas. Data triangulasi melalui FGD yang melibatkan informan kunci dari lembaga pemerintahan memberi dimensi tambahan terhadap pemahaman fenomena ini, sehingga tidak hanya berpijak pada satu jenis sumber data. Pendekatan serupa telah ditunjukkan efektif dalam penelitian kualitatif yang menempatkan pengalaman dan persepsi subjek sebagai pusat analisis.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik dengan tahapan pengkodean terbuka, kategorisasi tema, serta interpretasi naratif yang menggambarkan fenomena secara holistik. Tema-tema utama seperti hambatan dalam penempatan kerja, relevansi kurikulum dengan tuntutan administrasi publik, serta strategi alumni dalam mengembangkan karier akan diidentifikasi dan dikonstruksi. Analisis tematik ini memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman yang kaya tentang tantangan dan peluang karier alumni serta memberikan rekomendasi praktis bagi stakeholders pendidikan tinggi dan sektor publik. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memetakan realitas empiris, tetapi juga menawarkan wawasan untuk pengembangan kurikulum dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan karier lulusan Pemikiran Politik Islam di era modern (Sugiyono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kompetensi Lulusan Pemikiran Politik Islam dalam Administrasi Publik

Kompetensi utama lulusan Pemikiran Politik Islam (PPI) mencakup penguasaan teori politik Islam dan kemampuan analitis terhadap fenomena politik kontemporer serta pemecahan masalah kesejarahan dan kontemporer. Profil lulusan PPI umumnya dirumuskan sebagai pemikir, analis, dan peneliti yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis isu politik serta memberikan rekomendasi yang tepat berdasar teori dan praktik ilmu politik dan pemikiran Islam. Lulusan pemikiran politik Islam harus memahami dinamika pemikiran politik Islam serta keterkaitannya dengan tata pemerintahan, termasuk proses pembuatan kebijakan publik dan penyelenggaraan administrasi negara. Penguasaan terhadap konsep dasar ini merupakan kompetensi awal yang relevan bagi lulusan yang ingin terjun ke sektor administrasi publik, karena administrasi publik menuntut kemampuan memahami konteks sosial-politik yang lebih luas di balik kebijakan negara atau program publik yang dirumuskan dan dilaksanakan. Profil seperti ini menegaskan bahwa kemampuan analitis dan pemahaman teoretis menjadi modal penting untuk beradaptasi dalam lingkup administrasi publik, terutama dalam memahami dasar politik kebijakan dan dinamika pemerintahan yang berbasis kepada nilai keadilan, etika dan kepemimpinan (Mozin et al., 2025 : 5).

Kompetensi lulusan PPI tidak hanya terbatas pada penguasaan teori politik Islam, tetapi juga perlu mencakup kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai pemikiran Islam ke dalam praktik administrasi publik. Hal ini penting karena sektor publik sering berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat serta kebutuhan memperhatikan prinsip moral, etika dan keadilan sosial. Nilai-nilai seperti adil, amanah, dan musyawarah yang sering ditekankan dalam pemikiran Islam merupakan modal yang kuat untuk membentuk layanan publik yang responsif, akuntabel, dan menjunjung tinggi prinsip kemaslahatan masyarakat. Penelitian tentang integrasi nilai keilmuan Islam dalam praktik administratif pada pendidikan Islam menunjukkan bahwa penggabungan nilai-nilai spiritual dan moral dalam administrasi meningkatkan kualitas pengelolaan serta etika kerja. Walaupun konteksnya dalam administrasi pendidikan Islam, prinsip integrasi nilai tetap relevan sebagai landasan kompetensi lulusan PPI ketika menempatkan nilai-nilai Islam dalam proses administrasi publik yang lebih luas, seperti kebijakan sosial, birokrasi pelayanan publik, dan pembangunan masyarakat berkelanjutan. Dengan demikian, kompetensi nilai-nilai Islam memperkaya kemampuan lulusan pada ranah administratif sekuler dengan dimensi etika dan moral yang kuat (Tsabita & Fitriatin, 2024 : 13753).

Dalam konteks administrasi publik, lulusan PPI perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang tidak sekadar teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menganalisis kebijakan publik dan proses birokrasi yang kompleks. Kompetensi ini terutama penting ketika lulusan dihadapkan pada realitas implementasi kebijakan yang sering kali membutuhkan pemahaman mendalam tentang faktor politik, budaya, dan sosial di masyarakat. Analisis kebijakan publik menuntut keterampilan dalam menilai dampak, efektivitas, serta keterkaitan antara tujuan kebijakan dengan hasil implementasinya. Meski riset terbaru langsung mengenai PPI dan kebijakan publik masih terbatas, prinsip analisis kebijakan dari kajian administrasi publik sendiri menjadi tolok ukur kompetensi yang relevan: seorang profesional publik harus mampu mengukur serta memberikan rekomendasi perubahan kebijakan berdasar data empiris dan teori manajemen publik. Keterampilan semacam ini sangat berharga di pemerintahan dan pelayanan publik, karena meningkatkan kualitas evaluasi program dan keputusan strategis yang diambil oleh birokrat atau analis kebijakan organisasi public (Herwanto et al., 2024 : 205).

Kompetensi lulusan PPI yang relevan dengan administrasi publik selanjutnya adalah kemampuan manajerial dan pengelolaan organisasi. Administrasi publik menuntut kompetensi terkait merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, serta mengevaluasi program publik yang kompleks. Standar kompetensi lulusan pada program administrasi publik menunjukkan pentingnya penguasaan analisis siklus kebijakan publik, termasuk perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Keterampilan ini memungkinkan lulusan memahami seluruh tahapan proses kebijakan publik serta mampu mengidentifikasi peran masing-masing aktor dalam organisasi pemerintah. Ketika dilengkapi dengan wawasan pemikiran politik Islam, lulusan dapat menggabungkan etika nilai Islam dengan kompetensi manajerial yang kuat sehingga menghasilkan administrasi publik yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga akuntabel dan beretika. Kompetensi semacam ini membangun lulusan yang tidak hanya mampu memahami teori organisasi publik tetapi juga mengimplementasikannya dalam konteks kerja nyata pemerintahan dan pelayanan publik .

Kompetensi komunikasi adalah aspek penting yang harus dimiliki oleh lulusan PPI ketika berpindah peran ke administrasi publik. Dalam pelayanan publik dan pengelolaan kebijakan, kemampuan komunikasi yang baik membantu menyampaikan hasil analisis, memfasilitasi kerja sama dengan pemangku kebijakan, serta membangun dialog dengan masyarakat agar aspirasi publik dapat terwakili secara efektif. Profil kompetensi administrasi publik menekankan pentingnya kemampuan sosialisasi produk kebijakan dan partisipasi publik melalui media yang sesuai. Dengan keterampilan komunikasi yang kuat,

lulusan dapat merangkul berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil, media, dan lembaga negara. Kompetensi ini makin krusial di era digital dan keterbukaan informasi yang menuntut aparatur publik dapat berkomunikasi secara responsif dan proaktif dalam menyampaikan kebijakan maupun menerima masukan dari publik. Penguatan keterampilan komunikasi ini juga memungkinkan lulusan PPI berperan sebagai penghubung antara nilai-nilai etika Islam dan praktik kebijakan publik yang inklusif.

Etika profesionalisme merupakan kompetensi non-teknis yang tidak kalah penting bagi lulusan PPI yang ingin masuk ke dalam administrasi publik. Birokrasi publik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Diskusi akademis dalam ilmu administrasi publik menunjukkan bahwa kemampuan etika kerja aparatur publik menjadi dasar dari kualitas pelayanan publik yang baik. Kompetensi etika membantu lulusan memahami batasan moral serta tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Integrasi nilai-nilai Islam seperti amanah (kepercayaan), keadilan (*adl*), dan musyawarah dapat memperkuat dimensi etika ini, sehingga lulusan tidak hanya profisien secara teknis tetapi juga berintegritas tinggi. Kompetensi profesional ini esensial dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah serta memperkuat kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Herwanto et al., 2024).

Era digital menuntut aparatur publik dan profesional administrasi untuk memiliki kompetensi data serta kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Administrasi publik modern tergantung pada data untuk memformulasikan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kompetensi digital termasuk kemampuan mengelola data, menganalisis tren, serta menyajikan laporan secara profesional menjadi aspek penting dalam manajemen kebijakan publik. Meskipun kajian literatur langsung mengenai digitalisasi dalam kompetensi PPI masih relatif jarang, kompetensi semacam ini dapat dipandang sebagai penguatan lintas disiplin yang diperlukan lulusan untuk meningkatkan daya saingnya di sektor pemerintah dan organisasi publik. Lulusan yang mampu memadukan keahlian digital dengan nilai moral Islam akan lebih siap menghadapi tantangan teknologi dalam administrasi publik, khususnya dalam desain layanan publik berbasis teknologi serta analisis kebijakan yang lebih akurat berbasis data real-time (Rahim, 2023 : 2).

Kepemimpinan merupakan kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh lulusan yang ingin berkiprah di sektor administrasi publik, terutama ketika berperan dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Administrasi publik tidak hanya tentang menjalankan tugas administratif, tetapi juga melibatkan kepemimpinan dalam memobilisasi sumber daya serta koordinasi lintas lembaga. Kompetensi kepemimpinan efektif membantu lulusan dalam mengatasi konflik, membuat keputusan strategis, serta mengarahkan tim atau unit kerja untuk mencapai tujuan organisasi publik. Dengan pemahaman mendalam tentang pemikiran politik dan struktur pemerintahan yang diperoleh dari studi PPI, lulusan dapat menggabungkan keterampilan kepemimpinan formal dengan wawasan nilai sosial dan etika Islam dalam proses administrasi publik. Kompetensi ini penting dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Administrasi publik modern juga menuntut lulusan memiliki kompetensi dalam memahami dimensi lingkungan sosial dan keberlanjutan dalam pembuatan kebijakan publik. Lulusan PPI harus mampu mengaitkan pemikiran politik Islam tentang nilai masyarakat, keadilan dan kemaslahatan dengan kebutuhan aktual seperti pembangunan berkelanjutan dan pengentasan ketidakadilan sosial. Kemampuan literasi kebijakan lingkungan sosial ini membantu lulusan memahami kebutuhan masyarakat secara holistik serta menyusun kebijakan publik yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Kompetensi ini menggabungkan wawasan etika Islam dengan strategi kebijakan publik



yang responsif terhadap persoalan sosial kontemporer, seperti kesenjangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Hal ini menjadikan lulusan lebih siap berkiprah dalam tugas publik yang kompleks dan multidimensi.

Terakhir, lulusan PPI perlu memiliki pemahaman dan kompetensi kritis terhadap reformasi birokrasi yang menjadi fokus utama administrasi publik. Good governance dan reformasi birokrasi memerlukan kompetensi yang tidak hanya mencakup penguasaan sistem administrasi tetapi juga kemampuan mengevaluasi kelembagaan pemerintahan secara kritis serta mendukung perubahan struktural yang lebih baik. Kompetensi ini juga mencakup kemampuan memetakan tantangan birokrasi modern seperti resistensi terhadap perubahan, budaya kerja tidak efektif, serta kolaborasi antar unit pemerintahan. Dengan latar pemikiran politik Islam, lulusan dapat menempatkan kritik konstruktif terhadap sistem birokrasi publik, sambil menawarkan solusi yang berbasis nilai dan prinsip keadilan. Kompetensi semacam ini penting untuk mendorong transformasi birokrasi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik baik di tingkat lokal maupun nasional (Banatil Mufidah, Imam Fachruddin, Daimul Abror, Teguh Pramono, 2023 : 80).

### **Tantangan Lulusan Pemikiran Politik Islam di Sektor Administrasi Publik**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi lulusan Pemikiran Politik Islam ketika hendak memasuki sektor administrasi publik adalah ketidakselarasan antara kompetensi akademik yang dimiliki dan kebutuhan praktis birokrasi modern. Pendidikan Pemikiran Politik Islam secara tradisional menekankan pada kemampuan analisis teoritik, refleksi nilai-nilai etika, serta pemikiran normatif terhadap fenomena politik; namun sektor publik menuntut keterampilan teknis tersendiri seperti perumusan kebijakan publik, manajemen proyek, dan pelaksanaan program administratif secara efisien. Perbedaan fokus ini berimplikasi pada kesenjangan kompetensi yang membuat lulusan sering kali merasa kurang siap secara teknis untuk memenuhi tuntutan kerja administratif yang dinamis dan penuh tekanan. Hal ini diperparah oleh persaingan ketat di pasar kerja sektor publik, di mana lulusan dari program administrasi publik atau ilmu pemerintahan lebih sering diprioritaskan karena pemahaman yang lebih aplikatif terhadap sistem birokrasi. Kesenjangan ini menjadi tantangan struktural bagi lulusan Pemikiran Politik Islam yang ingin relevan secara profesional di lingkungan pemerintahan yang semakin menuntut keterampilan praktis serta adaptasi cepat terhadap perubahan kebijakan dan teknologi layanan publik.

Selain persoalan kompetensi, lulusan Pemikiran Politik Islam menghadapi tantangan signifikan dalam akses dan proses rekrutmen ke badan publik seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Studi kajian literatur pada Jurnal Ilmu Administrasi Negara (2025) menunjukkan bahwa proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih menghadapi tantangan besar terkait transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi calon pelamar dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Sistem seleksi yang kurang transparan, keterbatasan informasi tentang kebutuhan kompetensi spesifik, serta adanya persepsi bahwa jurusan tertentu lebih “tepat” untuk posisi administratif seringkali menciptakan hambatan awal bagi lulusan non-tradisional seperti Pemikiran Politik Islam. Tantangan ini tentu berdampak pada peluang masuk ke lembaga publik, karena lulusan harus bersaing dalam ranah seleksi yang belum sepenuhnya reflektif terhadap keragaman keilmuan yang ada di perguruan tinggi. Kendala akses ini juga menjadi bagian dari tantangan struktural yang perlu dievaluasi oleh pembuat kebijakan, agar proses rekrutmen publik mampu membuka peluang lebih luas bagi lulusan dari beragam disiplin ilmu termasuk yang memiliki pemahaman nilai-nilai etika, demokrasi, dan tata kelola yang kuat seperti lulusan Pemikiran Politik Islam.

Tantangan lain yang relevan adalah lingkungan birokrasi Indonesia yang sedang dalam proses reformasi dan sering menghadapi hambatan struktural yang kompleks. Reformasi birokrasi dalam konteks good governance masih menemui berbagai kendala internal seperti keterbatasan infrastruktur digital, hambatan teknis, serta masalah tumpang tindih layanan yang menghambat efektivitas pelayanan publik. Hambatan-hambatan ini tidak hanya menyulitkan birokrasi umum tetapi juga menambah tantangan bagi lulusan baru yang berusaha menyesuaikan diri dengan dinamika kerja publik. Lulusan Pemikiran Politik Islam yang memiliki orientasi nilai dan budaya keilmuan seringkali perlu memahami kerangka sistemik birokrasi yang kompleks, yang mencakup interaksi antara faktor politik, teknologi, dan administrasi. Realitas birokrasi yang membutuhkan adaptasi terus-menerus terhadap perubahan kebijakan publik memaksa lulusan untuk tidak hanya memahami teori tetapi juga harus menguasai seluk-beluk praktik birokrasi modern, termasuk keterampilan dalam digitalisasi layanan serta kemampuan melakukan inovasi dalam sistem administrasi publik yang masih sering terhambat oleh prosedur yang kaku dan tidak responsive (Suriyani BB, Asriani, La Ode Muhammad Elwan, 2024 : 2329).

Selain tantangan teknis dan struktural, lulusan Pemikiran Politik Islam juga menghadapi tantangan integrasi nilai keilmuan dengan ekspektasi publik terhadap pelayanan yang profesional dan berorientasi pada good governance. Sektor publik saat ini tidak hanya menuntut hasil kerja yang efektif dan kompeten, tetapi juga mengharapkan integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas setiap aparatur publik. Lulusan dengan latar pendidikan tradisional seperti Pemikiran Politik Islam perlu membangun kapasitas untuk menyelaraskan nilai-nilai moral sekaligus menjawab ekspektasi profesionalisme publik. Hal ini termasuk mampu menerapkan nilai Islam tentang amanah, keadilan, dan musyawarah dalam konteks kerja administratif yang pragmatis dan berorientasi pada hasil. Tantangan ini sering muncul ketika nilai-nilai ideal yang dimiliki lulusan perlu diterjemahkan secara konkret dalam praktik pelayanan publik sehari-hari, yang kadang menghadapi batasan birokratis, politik, dan budaya organisasi yang kompleks. Diperlukan kompetensi adaptif yang mampu menggabungkan landasan moral dengan tuntutan kinerja publik modern agar lulusan dapat menjadi agen perubahan yang efektif di sektor administrasi publik, menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam (Wiryanto, 2018 : 178).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Program Studi Pemikiran Politik Islam memiliki relevansi yang kuat dan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia untuk sektor administrasi publik di Indonesia. Lulusan Pemikiran Politik Islam dibekali kompetensi analitis, pemahaman nilai etika, serta kepekaan sosial yang menjadi modal penting dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan teori politik Islam, kemampuan analisis kebijakan publik, integrasi nilai keadilan dan amanah dalam praktik administrasi, hingga kapasitas kepemimpinan dan komunikasi publik. Dalam konteks demokrasi multikultural dan tuntutan good governance, lulusan Pemikiran Politik Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi sebagai analis kebijakan, perencana program, maupun aktor birokrasi yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi secara optimal karena masih adanya persepsi sempit terhadap ruang karier lulusan yang kerap dibatasi pada ranah akademik dan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memperluas pemahaman mengenai relevansi dan kontribusi nyata lulusan Pemikiran Politik Islam dalam sektor administrasi publik.

Di sisi lain, penelitian ini juga menegaskan bahwa lulusan Pemikiran Politik Islam menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural dalam memasuki serta beradaptasi di sektor administrasi publik. Tantangan tersebut meliputi kesenjangan antara kompetensi akademik dan kebutuhan teknis birokrasi, keterbatasan akses dalam sistem rekrutmen aparatur publik, kompleksitas lingkungan reformasi birokrasi, serta kesulitan menerjemahkan nilai-nilai normatif ke dalam praktik kerja administratif yang teknokratis. Meski demikian, tantangan ini sekaligus membuka peluang bagi penguatan kompetensi lulusan melalui pengembangan keterampilan praktis, literasi digital, pelatihan profesional, dan kolaborasi lintas disiplin. Dengan strategi pengembangan kurikulum yang lebih adaptif dan dukungan kebijakan pendidikan tinggi yang responsif terhadap kebutuhan sektor publik, lulusan Pemikiran Politik Islam berpotensi menjadi agen perubahan yang mampu menjembatani nilai etika Islam dengan praktik administrasi publik modern. Kesimpulan ini menegaskan bahwa Pemikiran Politik Islam tidak hanya relevan sebagai wacana akademik, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam membangun administrasi publik yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

## BIBLIOGRAPHY

- Banatil Mufidah, Imam Fachruddin, Daimul Abror, Teguh Pramono, M. C. B. U. (2023). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi*, 5(1), 77–83. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1504>
- Herwanto, T. S., Rohmansyah, H., Daga, A. K., & Getrudis, B. (2024). KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI ERA DIGITAL. *Jurnal Ilmu Administrasi Volume*, 15(2), 201–209.
- Istaryatiningtias, R. (2025). Analisis Status Pekerjaan Alumni : Persepsi dan Realita Arah Pencapaian Karier. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(3), 665–671. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i3.8137> Copyright
- Kahar Gani, M. J. (2025). *BIROKRASI PUBLIK DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG REFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN*. 6(1), 104–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.51577/ijipublication.v6i1.890>
- Mozin, S. Y., Bangko, N. R., & Juliawati, N. K. (2025). Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Pelayanan Publik. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(22), 01–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.277>
- Pratiwi, A. A., Kamila, H., Nikmah, N., & Marlina, L. (2025). *Pemikiran Politik Islam : Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia*. 3(2), 198–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2671>
- Rahim, R. (2023). *Strategi Pengembangan Kompetensi ASN di Era Transformasi Digital*. 14, 1–2.
- Rahmat Hidayat, Adi Setiabudi, E. J. N., Dewi, M. P., & Muksin, N. N. (2025). *Implementasi Etika Islam : Upaya Revitalisasi Etika Aparatur Birokrasi sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik*. 8(1), 118–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.263> Abstract
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suriyani BB, Asriani, La Ode Muhammad Elwan, R. W. Y. (2024). Penerapan prinsip transparansi badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan rekrutmen pppk di kabupaten muna barat. *Journal Publicuho*, 7(4), 2327–2339. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.603>
- PENERAPAN
- Tsabit, S. A., & Fitriatin, N. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Keilmuan dalam Praktik Etika



- Administrasi Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 13747–13759.  
<http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Wiryanto, W. (2018). *The need of public administration: an islamic perspective for higher education in indonesia*. 2(1), 172–197.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32832/tawazun.v9i2.1237>
- Yungkul. (2025). Optimalisasi Sistem Administrasi Publik dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(7), 3103–3111.